

Climate Diplomacy melalui European Green Deal: Tantangan dan Peluang dalam Diplomasi Iklim Global

**Ni Luh Putu Ayu Pamethya Dharma Gurnita
Fildza Razzqia
Deasy Silvia Sari
Dina Yulianti**

*Universitas Padjadjaran
Indonesia*

e-mail: luh22001@mail.unpad.ac.id, fildza22001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

Perubahan iklim telah menjadi permasalahan di tingkat global yang berdampak pada setiap negara, baik negara maju maupun berkembang. Untuk mengatasi isu ini, Uni Eropa (UE) sebagai salah satu institusi regional berupaya memimpin tatanan iklim global dengan meluncurkan kebijakan European Green Deal (EGD) pada tahun 2019 demi mencapai target Eropa sebagai benua pertama yang net-zero emissions di tahun 2050. Artikel ini bertujuan untuk meneliti bagaimana praktik diplomasi iklim diterapkan oleh Uni Eropa melalui instrumen kebijakan tersebut serta apa saja peluang dan tantangan yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka yang bersumber dari laman resmi European Commission, artikel jurnal terdahulu, dan berita. Temuan sementara dari penelitian ini adalah bahwa EGD mampu menjadi kekuatan normatif bagi UE dalam memperkuat posisinya di level internasional walaupun masih menghadapi beberapa tantangan keterbatasan dalam implementasi internal.

Kata Kunci: *diplomasi iklim, european green deal, perubahan iklim, uni eropa*

Climate change has become a global issue that affects every country, both developed and developing ones. To address this issue, the European Union (EU), as one of the regional institutions, seeks to lead the global climate order by launching the European Green Deal (EGD) policy in 2019 to achieve Europe's target as the first continent with net-zero emissions by 2050. This article aims to examine how climate diplomacy is practiced by the European Union through this policy instrument and what the opportunities and challenges it presents. This research uses a qualitative-descriptive method through literature studies sourced from the official website of the European Commission, previous journal articles, and news. The preliminary findings of this research show that the EGD is able to serve as a normative power for the EU in strengthening its position at the international level, although it still faces several internal implementation challenges.

Keywords: *climate change, climate diplomacy, european green deal, european union*

Pendahuluan

Perubahan iklim telah berkembang menjadi salah satu ancaman global paling mendesak di abad ke-21. Fenomena ini tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, melainkan telah meluas menjadi isu multidimensional yang mencakup keamanan nasional, stabilitas ekonomi global, keadilan sosial, dan bahkan eksistensi negara-bangsa. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menegaskan bahwa perubahan iklim berdampak langsung terhadap meningkatnya bencana alam, ketidakstabilan politik, migrasi paksa, dan konflik sumber daya, terutama di kawasan yang rentan (IPCC, 2023).

Negara-negara kepulauan kecil seperti Republik Kepulauan Marshall menjadi representasi paling nyata dari bahaya ini. Kenaikan permukaan laut telah merusak lahan pertanian, mencemari sumber air tawar, dan menyebabkan banjir yang mengancam pemukiman warga. Studi terbaru menunjukkan bahwa tanpa upaya mitigasi drastis, pulau-pulau ini kemungkinan besar akan menjadi tidak layak huni dalam beberapa dekade ke depan (Storlazzi et al., 2015). Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial (*existential threat*) yang memerlukan respons global dan kolektif.

Secara politik, isu perubahan iklim kini telah bergeser ke dalam ranah high politics dalam studi Hubungan Internasional. Ia memengaruhi kepentingan strategis negara, menentukan posisi dalam negosiasi multilateral, serta menjadi tolok ukur kepemimpinan global. Isu ini juga memperjelas ketimpangan struktural global: negara-negara berkembang dan kepulauan kecil menanggung dampak terburuk, meskipun mereka hanya menyumbang sebagian kecil dari total emisi global (United Nations Development Programme, 2020). Dalam konteks ini, diplomasi iklim menjadi alat penting bagi negara-negara terdampak untuk memperjuangkan kepentingannya di forum internasional, seperti Konferensi Para Pihak (COP) dari UNFCCC. *Paris Agreement* 2015 menandai tonggak awal kesadaran kolektif global, namun implementasinya sangat tergantung pada komitmen politik negara-negara besar dan instrumen kebijakan ambisius seperti *European Green Deal*. Perubahan iklim tidak bisa dihadapi secara unilateral; ia membutuhkan kerja sama internasional yang setara dan berbasis prinsip keadilan iklim (climate justice) (United Nations, 2015).

Uni Eropa (UE) telah memantapkan posisinya sebagai pemimpin global dalam diplomasi iklim. Sebagai salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca di dunia, UE menyadari tanggung jawab historis dan moralnya untuk memimpin transisi menuju ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan (Sunarti et al., 2020). Hal ini tercermin melalui keterlibatan aktif UE dalam Kesepakatan Paris 2015 dan implementasi kebijakan ambisius seperti European Green Deal yang diluncurkan pada akhir 2019. *Paris Agreement* menjadi titik balik penting dalam konsolidasi peran UE sebagai aktor iklim internasional. Dalam negosiasi COP21, UE tampil sebagai blok regional yang solid dan berperan sebagai "*normative power*" dengan mendorong target ambisius pembatasan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C (Oberthür & Dupont, 2021). UE tidak hanya memfasilitasi konsensus di antara negara-negara anggota, tetapi juga menjembatani kepentingan antara negara maju dan berkembang, serta mempromosikan prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (*common but differentiated responsibilities*).

Sementara itu, pembentukan EGD dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran akan darurat iklim di kawasan Eropa, ditandai dengan gelombang panas ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan, serta meningkatnya risiko banjir dan kerugian ekonomi yang mencapai miliaran euro setiap tahunnya (Fithriana & Dewi, 2023; Cammalleri et al., 2020). Dukungan politik terhadap agenda hijau juga menguat, sebagaimana tercermin

dari peningkatan suara untuk partai-partai hijau dan mobilisasi massa melalui gerakan seperti *Fridays for Future*. Dalam kerangka EGD, UE menetapkan sejumlah kebijakan lintas sektor untuk mendorong dekarbonisasi, efisiensi energi, dan transisi menuju ekonomi hijau. Inisiatif ini meliputi antara lain REPowerEU untuk diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dari Rusia, Strategi *Farm to Fork* untuk sistem pangan berkelanjutan, Strategi Deforestasi, *New European Bauhaus*, dan *European Sustainable Investment Plan* yang memobilisasi setidaknya €1 triliun investasi keberlanjutan selama satu dekade (European Commission, n.d.)

Dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya, EGD berupaya mewujudkan transformasi struktural menuju masa depan yang berkelanjutan. Inisiatif ini menegaskan bahwa upaya mencapai *net zero emissions* bukan sekadar pengurangan emisi, tetapi membentuk ulang model pembangunan Eropa secara holistik dan inklusif. European Green Deal merupakan langkah strategis Uni Eropa dalam menghadapi perubahan iklim dan memperkuat posisinya dalam diplomasi iklim global. Kebijakan ini menunjukkan upaya serius Uni Eropa untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 dan mendorong kerja sama internasional dalam isu lingkungan.

Namun, dalam pelaksanaannya sebagai alat diplomasi iklim, European Green Deal (EGD) tentu memiliki sejumlah peluang dan tantangannya tersendiri. Maka dari itu, timbul pertanyaan “Bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam mengimplementasikan European Green Deal (EGD) sebagai instrumen diplomasi iklim?” yang menjadi fokus permasalahan utama dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis peran Uni Eropa dalam mendorong diplomasi iklim global melalui kebijakan European Green Deal (EGD) serta menjelaskan sejumlah peluang dan tantangan yang ada padanya.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam menguraikan peluang dan tantangan Uni Eropa dalam melaksanakan diplomasi iklim global dengan menggunakan European Green Deal (EGD) serta mengeksplorasi benang merah antara kepentingan lingkungan, ekonomi, dan geopolitik dalam konteks hubungan internasional kontemporer. Mengingat adanya perubahan pada lanskap geopolitik, seperti meningkatnya rivalitas global, krisis energi pasca perang Rusia-Ukraina, dan dinamika transisi energi di negara-negara berkembang, artikel ini hadir sebagai kontribusi penting untuk memperluas pemahaman terkait kebijakan tentang bagaimana EGD dapat menjadi alat diplomasi iklim yang adaptif, inklusif, dan strategis dalam menciptakan tata kelola iklim global yang lebih adil dan merata.

Untuk dapat memahami bagaimana pengimplementasian diplomasi iklim dalam konteks hubungan internasional, diperlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan dinamika hambatan dari diplomasi iklim dan bagaimana rezim iklim membutuhkan sinergi antar aktor internasional untuk dapat meraih kesuksesan. Oleh karena itu, artikel ini akan menggunakan pendekatan Tantangan dan Peluang Diplomasi Iklim yang dikembangkan oleh Nick Mabey, Liz Gallagher, dan Camilla Born (2013) dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Pemikiran Mabey dkk. (2013) didasari oleh keyakinan bahwa isu iklim tidak dapat diperlakukan sebagai isu lingkungan semata, melainkan bagian yang eksistensial terhadap keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan negara sehingga diplomasi iklim menjadi kebutuhan strategis, bukan pilihan normatif, sebab tidak ada negara yang mampu mengelola risiko iklim secara unilateral.

Mabey dkk. (2013) menegaskan bahwa tantangan mendasar dari pelaksanaan diplomasi iklim adalah divergensi kepentingan nasional, di mana negara-negara di dunia memiliki tingkat emisi, kerentanan iklim, kapasitas ekonomi, dan prioritas pembangunan yang berbeda-beda. Diplomasi iklim juga sering kali gagal karena perubahan iklim belum

sepenuhnya terintegrasi ke dalam kepentingan inti suatu negara. Di banyak negara, isu iklim cenderung masih dinomorduakan dibandingkan agenda pembangunan ekonomi lainnya. Akibatnya, posisi negosiasi internasional sering bersifat defensif dan minim ambisi karena tidak ditopang oleh dukungan politik domestik yang kuat (Mabey et al., 2013). Meskipun demikian, Mabey, Gallagher, dan Born juga menjelaskan bahwa terdapat peluang strategis dalam diplomasi iklim. Salah satunya adalah bahwa agenda iklim dapat diintegrasikan dengan kepentingan ekonomi, keamanan, dan pembangunan. Ketika agenda transisi energi rendah karbon dibingkai sebagai peluang strategis dan bukan semata-mata kewajiban lingkungan, ruang politik untuk kerja sama internasional menjadi lebih terbuka dan realistik. Mereka juga menilai bahwa peluang lain dapat muncul melalui pemusatan isu iklim ke seluruh kebijakan negara melalui pendekatan *whole-of-government*, sehingga diplomasi iklim tidak lagi terbatas pada forum belaka, tetapi berkembang pula melalui jaringan dan kemitraan ekonomi lintas sektor.

Dalam konteks pelaksanaan European Green Deal (EGD) sebagai bentuk dari diplomasi iklim, dapat dilihat bahwa Uni Eropa (UE) menempatkan isu iklim sebagai kepentingan strategis yang berkaitan dengan daya saing ekonomi, ketahanan energi, dan posisi geopolitik secara global. Dengan demikian, kerangka pemikiran Mabey dkk. (2013) memungkinkan peneliti untuk menganalisis sejauh mana EGD berhasil menyelaraskan kepentingan domestik dan internasional Uni Eropa, memperluas ruang kerja sama global, sekaligus mengelola konflik kepentingan dan ketegangan geopolitik dalam transisi menuju tata kelola iklim global yang lebih baik.

Metode

Metode yang digunakan pada kajian artikel ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang secara sederhana bertujuan untuk menjelaskan suatu isu atau fenomena. Pengumpulan data kualitatif tersebut akan bersifat sekunder, yang bersumber dari berbagai literatur mulai dari artikel jurnal, laporan, laman resmi European Commission, maupun berita-berita. Artikel ini akan berfokus pada bagaimana European Green Deal digunakan oleh Uni Eropa sebagai insrumen dalam melakukan diplomasi iklim di tingkat global. Analisis menggunakan paradigma diplomasi, yang secara spesifik menyoroti pada diplomasi iklim atau *climate diplomacy*. Dilomasi iklim di sini merupakan elemen penting dalam hubungan internasional karena melibatkan proses negosiasi, kesepakatan, dan upaya diplomatik untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Melalui perundingan, para diplomat dan negosiator berupaya mencapai komitmen bersama, menyelesaikan konflik, dan mendorong tercapainya tujuan kolektif dalam kebijakan iklim (Munge, 2023). Diplomasi ini tidak hanya menjadi bagian integral dari kebijakan iklim global, tetapi juga memengaruhi dinamika hubungan antarnegara. Salah satu isu utama dalam diplomasi iklim adalah ketimpangan antara negara maju dan berkembang, yang kerap kali memiliki perbedaan kepentingan serta tanggung jawab dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ketegangan antara prinsip keadilan dan tanggung jawab historis menjadi tantangan utama dalam negosiasi internasional, dan menyelaraskan perbedaan ini merupakan bagian kompleks dari upaya diplomasi iklim global (Oberthür & Dupont, 2021). Konsep *normative power* juga sedikit disinggung dalam artikel ini untuk memperlihatkan pengaruh ideologis khas Uni Eropa dalam hubungan internasional yang terinspirasi dari konsep *civilian power* oleh François Duchêne dan konsep *soft power* oleh Joseph Nye. *Normative power* atau kekuatan normatif adalah sebuah kerangka sosiologis yang memandang Uni Eropa bukan semata-mata organisasi berbasis kekuatan material, melainkan kekuatan normatif yang justru mengandalkan nilai-nilai seperti perdamaian, demokrasi, hak asasi manusia, hukum supranasional, dan pembangunan berkelanjutan yang tetap mengikat secara hukum dalam menyebarkan pengaruhnya (Manners, 2011 dalam (Fusiek, 2021).

Hasil dan Pembahasan

EGD sebagai Alat Diplomasi Iklim

Krisis iklim telah menjadi problematika yang dialami seluruh negara di dunia secara universal yang memengaruhi berbagai kawasan dalam kebijakan luar negeri. Untuk itu, para aktor negara akan berupaya memulihkan kondisi lingkungan global melalui pembentukan komitmen politik yang didasari dengan proses diplomasi, khususnya dalam konteks iklim. Dalam memahami diplomasi iklim, setidaknya terdapat beberapa faktor, di antaranya (Tiwari, 2023):

1. kebijakan iklim universal, utamanya pelaksanaan Perjanjian Paris,
2. fokus pada dampak perubahan iklim terhadap perdamaian dan keamanan dunia,
3. mempercepat aksi nasional dan meningkatkan semangat global,
4. meningkatkan kolaborasi iklim internasional melalui promosi dan penyuluhan.

Kebijakan iklim UE semakin menguat melalui European Green Deal, yang bertujuan untuk menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang netral karbon pada tahun 2050. Inisiatif ini melibatkan berbagai sektor strategis seperti energi, transportasi, pertanian, industri, dan keuangan, serta dilengkapi dengan mekanisme pendanaan transisi seperti Just Transition Fund (European Commission, 2020). Kebijakan ini menegaskan bahwa kepemimpinan iklim UE tidak hanya retoris, tetapi juga dibarengi oleh langkah-langkah struktural yang konkret. Selain itu, UE juga memainkan peran penting dalam mendefinisikan arsitektur tata kelola iklim global pasca-Paris. Melalui sistem perdagangan emisi karbon (*EU Emissions Trading System*), UE menunjukkan bahwa mekanisme berbasis pasar dapat digunakan secara efektif untuk mengurangi emisi sambil tetap menjaga daya saing ekonomi. Keberhasilan sistem ini menjadikan UE sebagai model kebijakan iklim bagi banyak negara dan kawasan lainnya.

Lebih dari sekadar cetak biru kebijakan domestik, EGD pun turut berkembang menjadi suatu instrumen diplomasi iklim yang sangat strategis, yang mencerminkan upaya UE untuk memperkuat kepemimpinannya dalam tata kelola iklim global. EGD memperlihatkan bagaimana kebijakan lingkungan dapat dijadikan alat yang signifikan dalam diplomasi multilateral untuk memengaruhi agenda, norma, dan perilaku negara lain. Salah satu dimensi penting dari EGD sebagai alat diplomasi adalah bagaimana UE mengintegrasikan visi keberlanjutannya dalam forum internasional seperti Conference of Parties (COP) UNFCCC, di mana UE menunjukkan komitmennya terhadap diplomasi lingkungan (Gultom et al., 2024). Peran UE dalam aksi iklim global juga meluas ke kerangka kerja multilateral lainnya, salah satunya seperti G20, di mana UE mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan bersama negara-negara ekonomi besar lainnya (Solechah & Sugito, 2023). UE secara konsisten menempatkan dirinya sebagai aktor normatif yang bergerak membuat standarisasi target emisi, mempromosikan energi terbarukan, dan mendorong perjanjian global yang lebih ambisius. Melalui EGD, UE membangun narasi utama untuk mendorong negara lain agar mengadopsi transisi hijau sebagai bagian dari komitmen internasional terhadap Perjanjian Paris.

EGD juga berhasil mendorong terbentuknya kemitraan strategis yang disebut *Green Alliances* atau *Green Partnerships*, yang menggabungkan kerja sama teknis, pendanaan iklim, dan diplomasi politik (Fitriana & Dewi, 2023). Inisiatif seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) juga telah dilakukan dengan melibatkan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Afrika Selatan, dan Vietnam. Hal ini menjadi contoh konkret bagaimana EGD menjadi alat untuk membangun diplomasi yang lebih bersifat

kolaboratif dan transformatif. Forum diskusi seperti ini bermanfaat bagi masing-masing negara untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan kepada satu sama lain guna mencapai transisi energi yang merata (Simanjuntak, 2023).

Namun, EGD juga memiliki dimensi koersif dalam aspek diplomasinya yang ditunjukkan melalui kebijakan seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM). CBAM merupakan mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk memastikan bahwa produk-produk impor yang masuk ke pasar Uni Eropa dikenai biaya karbon yang setara dengan produk yang diproduksi di dalam wilayah UE. Tujuan utama CBAM adalah mencegah “kebocoran karbon” (*carbon leakage*), yaitu perpindahan produksi ke negara dengan regulasi emisi yang lebih longgar atau masuknya produk impor dengan jejak karbon tinggi yang dapat merusak upaya pengurangan emisi di Eropa (Jolevski, 2022). Meskipun secara resmi CBAM bertujuan mencegah kebocoran karbon dan memastikan persaingan yang adil, kebijakan ini juga dapat dipahami sebagai alat diplomasi tekanan (*coercive diplomacy*) sebagai suatu strategi manajemen krisis yang pada akhirnya memaksa negara mitra untuk menyesuaikan diri dengan standar hijau UE. Dalam hal ini, EGD tidak hanya mengedepankan persuasi, tetapi juga penggunaan kekuatan struktural ekonomi untuk mengekspor nilai-nilai lingkungan ke luar perbatasannya.

Meskipun demikian, EGD juga membuka ruang diplomasi yang lebih progresif melalui mekanisme pembiayaan iklim, alih teknologi, dan pembangunan kapasitas. Pendanaan seperti EU Global Gateway dan skema dukungan dari European Investment Bank (EIB) diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur hijau di negara-negara mitra. Contohnya, Indonesia dipilih sebagai tempat bagi EIB untuk membuka kantor perwakilan baru yang fokusnya ada pada pembiayaan iklim di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Sebelumnya, EIB juga memiliki pengalaman proyek transportasi umum ramah lingkungan di India serta sanitasi dan pengelolaan limbah di Kamboja (Susanti, 2022). Hal ini juga sejalan dengan kesepakatan pada pertemuan UNFCCC pada tahun 1992 yang mendorong negara-negara maju untuk membantu menyokong pendanaan iklim negara-negara berkembang. Ini memperkuat dimensi pembangunan dalam diplomasi iklim UE, dan berfungsi sebagai alat untuk mengatasi resistensi negara-negara Global South terhadap kebijakan seperti CBAM. Dalam konteks ini, EGD bukan hanya kebijakan internal UE, tetapi juga refleksi dari strategi diplomatik UE dalam membentuk tatanan iklim global yang sesuai dengan visinya.

Peluang EGD dalam Diplomasi Iklim Global

Strategi diplomasi iklim Uni Eropa (UE) merupakan pilar utama dalam hubungan eksternal UE, yang mencerminkan keterkaitan antara aksi iklim dan kerja sama global. Secara rinci, diplomasi iklim menjadi pelengkap yang krusial bagi kebijakan iklim internal UE yang ambisius, yang secara keseluruhan bertujuan untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050. Dengan memanfaatkan komitmen hukumnya dan kepemimpinannya dalam pembangunan berkelanjutan, UE menjalin kerja sama dengan aktor global untuk mendorong kebijakan iklim yang ambisius, memperkuat kerangka kerja internasional, dan membangun ketahanan di wilayah-wilayah yang rentan (European Commission, 2024). European Green Deal (EGD) telah menjadi pilar utama dalam strategi diplomasi iklim Uni Eropa (UE), memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam upaya mitigasi perubahan iklim. EGD tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan domestik untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang memungkinkan UE untuk mempengaruhi agenda iklim global melalui berbagai mekanisme. Hal ini memungkinkan UE untuk memimpin dalam menetapkan agenda iklim global dan mendorong negara-negara lain

untuk mengikuti jejaknya dalam menerapkan kebijakan yang ambisius dalam mitigasi perubahan iklim.

EGD sendiri memiliki target yang sejalan dengan upaya global seperti UN Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus untuk mencapai tujuan iklim sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, Perjanjian Paris melingkupi tujuan-tujuan tersebut sebagai suatu keterikatan dengan pedoman saat ini yang mengarahkan seluruh negara untuk menetapkan rencana jangka panjang dalam upaya mitigasi gas rumah kaca dan pemanasan global (Tiwari, 2022). Dengan demikian, hal ini tentunya akan memperkuat implementasi EGD dan juga citra UE sebagai pelopornya dalam menunjukkan eksistensinya pada diplomasi iklim di tingkat global. Selain itu, EGD dapat menciptakan peluang untuk pertumbuhan hijau, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kerja sama dalam aksi iklim dengan negara-negara tetangga, misalnya seperti di kawasan Mediterania Selatan (Sandri et al., 2023).

Lebih lanjut, EGD juga memberikan UE peluang ekonomi yang besar, terutama bagi sektor teknologi rendah karbon dan digital. Melalui penguatan rantai pasok global untuk energi terbarukan, UE dapat mendorong keterlibatan bisnis Eropa dalam pasar energi baru, seperti hidrogen hijau, penyimpanan energi, dan jaringan listrik lintas batas. Dalam hal ini, EGD berfungsi ganda: sebagai alat diplomasi normatif dan sebagai sarana membuka akses pasar bagi perusahaan-perusahaan Eropa di kawasan Global Selatan. Secara geopolitik, EGD memberi UE posisi tawar dalam membentuk kemitraan strategis dengan negara-negara di kawasan Afro-Eur-Asia, seperti India, Mesir, Maroko, dan Indonesia. Negara-negara ini dipilih karena potensi transisi energinya, kebutuhan investasi, dan kedekatan strategis. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih realistik dan tidak terlalu ideologis, UE dapat mendorong kerja sama berbasis kebutuhan lokal, seperti perluasan akses listrik, efisiensi energi, dan pembangunan kapasitas. Dukungan dalam bentuk keuangan, teknologi, serta pelatihan teknis menjadi kunci keberhasilan diplomasi ini (Pastukhova et al., 2020).

Berdasarkan kacamata Mabey dkk. (2013), terdapat tiga tahap kritis agar diplomasi iklim dapat terlaksana dengan efektif, yakni: (1) menegosiasikan kesepakatan atau perjanjian global; (2) membangun situasi politik internasional; serta (3) implementasi dan integrasi. Ketiga tahap ini mampu menjadi mekanisme utama untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada secara strategis. Mabey dkk. memandang bahwa tujuan dari diplomasi iklim dapat terwujud apabila diplomasi tersebut dijalankan secara bertahap, berkelanjutan, dan beriringan dengan perkembangan rezim iklim internasional. Pada tahap pertama, peluang diplomasi iklim terletak pada kemampuan negara untuk menggunakan forum multilateral seperti UNFCCC sebagai arena legitimasi, agenda-setting, dan artikulasi kepentingan nasional dalam kerangka global. Kemudian, tahap kedua merupakan titik di mana diplomasi iklim tidak lagi terbatas pada meja perundingan formal, tetapi meluas ke pembentukan koalisi, dialog informal, forum eksklusif, serta integrasi isu iklim ke dalam agenda politik dan geopolitik yang lebih luas. Sementara itu, tahap ketiga memperlihatkan keterkaitan paling langsung antara diplomasi iklim dan peluang jangka panjangnya. Peluang terbesar diplomasi iklim justru muncul ketika komitmen internasional diterjemahkan ke dalam perubahan domestik yang nyata dan terintegrasi lintas sektor.

Pada akhirnya, peluang diplomasi iklim UE melalui EGD ini akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengelola keterbatasan sumber daya dan merespons perbedaan transisi energi antara UE dan negara mitra. Dibutuhkan kesabaran strategis dan pendekatan multilevel untuk memastikan bahwa EGD tidak hanya dipahami sebagai instrumen dominasi, tetapi sebagai tawaran kerja sama yang adil dan saling menguntungkan. Dalam menghadapi krisis iklim dan ketegangan geopolitik, EGD

memberi UE peluang langka untuk menegaskan dirinya sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab, kolaboratif, dan visioner dalam transformasi energi dunia.

Tantangan EGD dalam Diplomasi Iklim Global

EGD menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius, baik dari sisi internal Uni Eropa maupun dalam konteks kerja sama internasional di bidang perubahan iklim. Tantangan-tantangan ini dapat memengaruhi efektivitas EGD sebagai alat diplomasi iklim global. Salah satu tantangan utama berasal dari perbedaan kepentingan dan kapasitas negara-negara anggota Uni Eropa. Tidak semua negara anggota memiliki kesiapan yang sama dalam melakukan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Skandinavia cenderung lebih maju dalam penggunaan energi terbarukan, sementara negara-negara Eropa Tengah dan Timur masih bergantung pada batu bara dan menghadapi kendala ekonomi untuk melakukan transformasi energi (Bocquillon & Maltby, 2020). Perbedaan ini sering menimbulkan ketidaksepakatan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan EGD, serta memperlambat proses pengambilan keputusan secara kolektif di tingkat Uni Eropa.

Tantangan selanjutnya adalah dampak geopolitik terhadap agenda iklim Uni Eropa, terutama sejak krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina. Ketergantungan terhadap energi fosil dari Rusia menyebabkan beberapa negara Uni Eropa terpaksa kembali menggunakan batu bara dalam jangka pendek, yang bertentangan dengan tujuan dekarbonisasi EGD. Meskipun Uni Eropa merespons dengan kebijakan REPowerEU untuk mempercepat transisi energi bersih dan mengurangi ketergantungan energi luar, krisis ini menunjukkan betapa rentannya ambisi iklim terhadap tekanan eksternal dan kepentingan keamanan energi (McWilliams et al., 2022).

Hambatan lainnya muncul dalam dimensi diplomasi internasional. Salah satu komponen EGD yang penting adalah mekanisme penyesuaian karbon lintas batas (*Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM*) yang dirancang untuk mengenakan tarif pada produk impor dengan jejak karbon tinggi. Meskipun kebijakan ini bertujuan mendorong standar lingkungan yang lebih tinggi secara global, banyak negara berkembang mengkritiknya sebagai bentuk proteksionisme hijau yang dapat merugikan perekonomian mereka (Marcu et al., 2020). Hal ini berisiko memperlemah kerja sama antara negara maju dan negara berkembang dalam forum iklim internasional. Selain itu, posisi Uni Eropa sebagai pemimpin iklim global tidak selalu mendapat dukungan penuh dari negara-negara besar lainnya. Meskipun UE sering tampil sebagai aktor normatif yang mendorong target iklim yang ambisius, negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan India sering kali memiliki pendekatan yang lebih hati-hati atau pragmatis dalam negosiasi iklim (Oberthür & Dupont, 2021). Hal ini membuat Uni Eropa sulit membangun konsensus global yang solid, sehingga perannya dalam diplomasi iklim bersifat terbatas pada pengaruh normatif, bukan kekuatan politik yang mengikat.

Uni Eropa juga menghadapi tantangan keterbatasan dalam implementasi internal. Meskipun EGD telah disertai dengan berbagai strategi sektor seperti *Farm to Fork*, *Circular Economy Action Plan*, dan *New European Bauhaus*, banyak kebijakan masih berada dalam tahap perencanaan atau awal implementasi. Hambatan administratif, resistensi dari sektor industri, serta keterbatasan dana di beberapa negara anggota dapat menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan (Skjærseth, 2021). Selain itu, perubahan kebijakan di tingkat nasional akibat pergantian pemerintahan juga dapat mempengaruhi konsistensi pelaksanaan EGD di masing-masing negara. Meskipun *European Green Deal* merupakan salah satu inisiatif paling ambisius dalam diplomasi iklim global, Uni Eropa tetap menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan ambisinya. Tantangan-tantangan tersebut mencerminkan pentingnya pendekatan yang

lebih fleksibel, adil, dan inklusif, baik di tingkat internal Uni Eropa maupun dalam kerja sama iklim internasional. Untuk menjaga kredibilitas dan efektivitasnya, Uni Eropa perlu terus membangun solidaritas internal, memperkuat kemitraan global, serta menyesuaikan strategi iklim dengan dinamika politik dan ekonomi global yang terus berubah.

Kesimpulan

European Green Deal (EGD) merupakan langkah strategis Uni Eropa (UE) untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam diplomasi iklim global. Tidak hanya sebagai kebijakan domestik yang bertujuan mencapai netralitas karbon pada 2050, EGD juga menjadi instrumen eksternal yang digunakan UE untuk mempengaruhi tata kelola iklim internasional. Melalui diplomasi iklim, UE memanfaatkan EGD untuk membangun standar lingkungan, membentuk kemitraan strategis seperti Green Alliances dan Just Energy Transition Partnership (JETP), serta menguatkan posisinya dalam forum multilateral seperti COP dan G20. Pendekatan ini menempatkan UE sebagai kekuatan normatif global yang tidak hanya berfokus pada kepentingan internal, tetapi juga pada transformasi global yang inklusif dan berkelanjutan.

Peluang European Green Deal (EGD) dalam diplomasi iklim mencakup peningkatan kerja sama dengan negara berkembang melalui pendanaan iklim, alih teknologi, dan pembangunan kapasitas. Mekanisme seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), meski kontroversial, digunakan sebagai alat tekanan diplomatik agar negara mitra menaati standar lingkungan global. Selain itu, EGD mendorong pertumbuhan sektor hijau UE, membuka akses pasar baru, dan memperkuat kerja sama energi lintas kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan iklim juga dapat berperan sebagai pendorong kepentingan ekonomi dan geopolitik.

Secara keseluruhan, European Green Deal (EGD) merupakan terobosan kebijakan yang memperlihatkan bagaimana isu perubahan iklim telah bergeser menjadi bagian integral dari politik luar negeri dan hubungan internasional. Akan tetapi, efektivitas EGD sebagai alat diplomasi juga menghadapi tantangan besar, mulai dari perbedaan kesiapan transisi energi antar negara anggota UE, tekanan geopolitik seperti krisis energi akibat perang Rusia–Ukraina, hingga resistensi dari negara-negara berkembang terhadap kebijakan yang dianggap proteksionis. Untuk mempertahankan kepemimpinan globalnya, UE perlu mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dan berkeadilan, serta memastikan bahwa EGD tidak dipandang sebagai dominasi normatif, melainkan sebagai tawaran kerja sama yang adil dan konstruktif. Dengan demikian, EGD dapat merepresentasikan upaya UE untuk menjadikan transisi hijau tidak hanya semata-mata sebagai kewajiban moral, tetapi juga strategi diplomasi global yang menyeluruh dan bermanfaat.

Daftar Pustaka

- Bocquillon, P., & Maltby, T. (2020). EU energy policy integration as embedded intergovernmentalism: the case of Energy Union governance. *Journal of European Integration*, 42(1), 39–57. <https://doi.org/10.1080/07036337.2019.1708339>
- Cammalleri, C. (2020). *Global warming and drought impacts in the EU*. <https://doi.org/10.2760/597045>
- European Commission. (n.d.). *Progress Report 2023 Climate Action Climate Action*.

*Climate Diplomacy melalui European Green Deal:
Tantangan dan Peluang dalam Diplomasi Iklim Global*

- European Commission. (2024, November 14). *The European Green Deal*. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/story-von-der-leyen-commission/european-green-deal_en
- Fithriana, A., & Santika Dewi, E. (2023). EUROPEAN GREEN DEAL: INSTITUSIONALISME UNI EROPA DALAM MENGHADAPI ISU PERUBAHAN IKLIM. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2).
- Fusiek, D. A. (2021). *EU as a Green Normative Power: How could the European Green Deal become a normative tool in EU's climate diplomacy?*
- Gultom, Y. S. M., Manurung, S. M., Hutaurok, M. D. F., Gibran, M. F., & Augustin, A. (2024). Kekuatan Normatif Diplomasi Lingkungan Uni Eropa Dalam Conference of the Parties (COP) 26. In *Hasanuddin Journal of International Affairs* (Vol. 4, Issue 1). Online.
- IPCC. (2023). *Climate Change 2023 Synthesis Report* (P. Arias, M. Bustamante, I. Elgizouli, G. Flato, M. Howden, C. Méndez-Vallejo, J. J. Pereira, R. Pichs-Madruga, S. K. Rose, Y. Saheb, R. Sánchez Rodríguez, D. Ürge-Vorsatz, C. Xiao, N. Yassaa, J. Romero, J. Kim, E. F. Haites, Y. Jung, R. Stavins, ... C. Péan, Eds.). <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>
- Jolevski, Z. (2022). EU CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES. *International Journal of Economic, Management and Tourism*, 2, 91–101. <https://doi.org/10.46763/IJEMT>
- Mabey, N., Gallagher, L., & Born, C. (2013). *Understanding Climate Diplomacy Building diplomatic capacity and systems to avoid dangerous climate change About E3G*. www.e3g.org
- Marcu, A., Mehling, M., Cosbey, A., Dybka, D., Agrotti, D., Caspani, M., & Vangenechten, D. (2020). *Border Carbon Adjustments in the EU Issues and Options* ERCST Team working on the Paper.
- McWilliams, B., Sgaravatti, G., Tagliapietra, S., & Zachmann, G. (2022). *A grand bargain to steer through the European Union's energy crisis*.
- Munge, K. (2023). *Climate Diplomacy and Geopolitics: Exploring the Role of Climate Policy in International Relations*. 2(1), 1–14. www.carijournals.org
- Oberthür, S., & Dupont, C. (2021). The European Union's international climate leadership: towards a grand climate strategy? *Journal of European Public Policy*, 28(7), 1095–1114. <https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1918218>
- Pastukhova, M., Pepe, J., & Westphal, K. (2020). *Beyond the Green Deal: Upgrading the EU's Energy Diplomacy for a New Era*.
- Sandri, S., Hussein, H., Alshyab, N., & Sagatowski, J. (2023). The European Green Deal: Challenges and opportunities for the Southern Mediterranean. *Mediterranean Politics*. <https://doi.org/10.1080/13629395.2023.2237295>
- Simanjuntak, U. (2023, June 27). *Fairness and Inclusivity Should be the Foundation of Indonesia's JETP Investment Plan*. <https://iesr.or.id/en/fairness-and-inclusivity-should-be-the-foundation-of-indonesias-jetp-investment-plan/>

- Skjærseth, J. B. (2021). Towards a European Green Deal: The evolution of EU climate and energy policy mixes. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 21(1), 25–41. <https://doi.org/10.1007/s10784-021-09529-4>
- Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12–23. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.1487>
- Storlazzi, C. D., Elias, E. P. L., & Berkowitz, P. (2015). Many Atolls May be Uninhabitable Within Decades Due to Climate Change. *Scientific Reports*, 5. <https://doi.org/10.1038/srep14546>
- Sunarti, Pudjianto, S. Y., & Fahriansyah, O. (2020). *PERAN UNI EROPA DALAM PENERAPAN EKONOMI HIJAU STUDI KESEPAKATAN PARISTAHUN 2015-2018*. <https://jurmafis.untan.ac.id>
- Susanti, S. D. (2022, February 18). *EIB di Indonesia dukung pembiayaan tangani perubahan iklim*. <https://www.antaranews.com/berita/2712269/eib-di-indonesia-dukung-pembiayaan-tangani-perubahan-iklim>
- Tiwari, A. (2022). Priority of Materials Research for Reaching Climate Neutrality Goals. *Advanced Materials Letters*, 13(1), 2201–1683. <https://doi.org/10.5185/amlett.2022.011683>
- Tiwari, A. (2023). *Climate Diplomacy to Attain Global Eco-Neutrality*.
- United Nations. (2015). *PARIS AGREEMENT*.
- United Nations Development Programme. (2020). *The next frontier Human development and the Anthropocene Human Development Report 2020*. <http://hdr.undp.org>.